

**UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) DALAM MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA
DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2023**

Oleh: Nur Hasanah

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., M.A

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study examines the dynamics of handling Rohingya refugees in Aceh Province from 2020 to 2023, focusing on social, political, humanitarian, and inter-agency coordination aspects. The increasing influx of arrivals has made Aceh Province a major transit area for Rohingya refugees fleeing the conflict and humanitarian crisis in Myanmar. This study examines the roles of UNHCR, local governments, NGOs, and local communities in responding to the crisis through various stages, from emergency rescue and registration to placement and relocation planning to more centralized shelters.

The research method used was a qualitative approach with descriptive analysis of official documents, humanitarian organization reports, and other secondary data. This study utilizes a liberal institutionalism perspective, which refers to the state requiring a specific organizational role in addressing a phenomenon. This perspective is then developed using international organization theory, focusing on UNHCR's efforts to respond to, address, and resolve the Rohingya refugee crisis in Aceh Province.

The results of this study indicate that UNHCR's efforts to address the Rohingya refugee problem in Aceh Province encompass several aspects, including providing basic protection, registering and determining refugee status, providing basic assistance such as shelters and healthcare during the pandemic, and working collaboratively with international institutions, local governments, and NGOs. These efforts emphasize refugee protection while implementing humanitarian policies as a means of protection for refugees, developed by international organization theory. These efforts are said to be effective in protecting the rights of Rohingya refugees in Aceh Province, but they still face challenges such as limited legal protection, a lack of human resources, and resistance from the local community.

Keywords: *Rohingya refugees, UNHCR, Aceh Government, humanitarian crisis*

PENDAHULUAN

Ketika terjadinya genosida pada tahun 2020 terhadap etnis rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, *International Court of Justice* atau Mahkamah

Internasional menginstruksikan Myanmar untuk segera mengambil tindakan mendesak guna mencegah terjadinya dugaan genosida berkelanjutan terhadap etnis tersebut dan mewajibkan myanmar

menyampaikan laporan dalam jangka waktu empat bulan. Akibat dari gerakan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar, etnis rohingya kembali melakukan perjalanan untuk mencari tempat yang lebih nyaman dan jauh dari kekerasan seperti di negaranya. Salah satu pendaratan mereka adalah Provinsi Aceh yang dekat dengan Laut Andaman, yaitu perairan yang mereka lintasi menggunakan kapal kayu. Sebanyak 99 orang diselamatkan di Aceh Utara dengan jumlah wanita 48 orang, anak-anak berjumlah 34 orang dan pria dewasa berjumlah 17 orang.¹

Penderitaan yang dialami etnis rohingya tidak berhenti sampai disitu saja, ketika pandemi covid-19 masih berlangsung pada tahun 2021, otoritas Bangladesh menerapkan karantina wilayah yang ketat selama pandemi, sehingga semakin membatasi kebebasan bergerak dan akses pekerjaan bagi pengungsi Rohingya. Dalam situasi yang semakin memburuk, kelompok bersenjata kian menguat melalui praktik kekerasan dan pemerasan. Kondisi kehidupan yang semakin terpuruk juga diperparah oleh peristiwa kebakaran di kamp, termasuk insiden di Balukhali pada bulan Maret yang melukai 11 orang serta menghancurkan sebuah klinik MSF.²

Krisis rohingya terus berlanjut tanpa ada kepastian kapan

etnis tersebut merasakan kebebasan hak sebagai warga negara Myanmar yang dimana hak tersebut telah hilang berpuluh-puluh tahun lalu. Pada tahun 2022, terjadi sebuah insiden yang menakutkan bagi para etnis rohingya di Myanmar dimana Junta Militer mengeksekusi 4 tahanan dengan hukuman mati pertama kalinya setelah beberapa dekade terakhir sehingga semakin memicu kekhawatiran bagi etnis Rohingya untuk tetap berada di negara tersebut.

Memasuki bulan Agustus, 2 orang pemimpin komunitas Rohingya di Myanmar ditembak mati di salah satu kamp penampungan yang berada di Bangladesh.³ Hal tersebut kemudian memicu sebagian dari etnis rohingya memutuskan untuk meninggalkan Myanmar, dan menuju ke beberapa negara untuk mendapatkan perlindungan. Salah satu tujuan mereka adalah negara Malaysia, namun karena seringkali terjadi konflik masyarakat terhadap kehadiran etnis tersebut, Malaysia mulai melakukan pemblokiran terhadap kedatangan etnis Rohingya. Hal ini menjadi penyebab etnis rohingya kembali terombang-ambing ditengah laut, dan memutuskan untuk mendarat di Provinsi Aceh sebagai garis pantai yang paling dekat dengan Malaysia.

Pada tahun 2023 akhir, Indonesia kembali dihebohkan dengan kedatangan kapal-kapal yang berisikan ratusan manusia yang diklaim sebagai pengungsi Rohingya dan kembali mendarat di tanah Aceh. Kedatangan pengungsi Rohingya

¹ Muhammad Yanuar Farhanditya, 2020. *Ratusan Pengungsi Rohingya membutuhkan Bantuan Darurat anda*, UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/13173-ratusan-pengungsi-rohingya-membutuhkan-bantuan-darurat-anda.html> , diakses pada 22 November 2024

² Concern Worldwide US, 2025. "The Rohingya Crisis, explained" <https://concernusa.org/news/rohingya-crisis-explained/> diakses 22 Agustus 2025

³ Dw.com, 2022. "Kronologi 5 tahun Krisis Rohingya" <https://amp.dw.com/id/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya/a-62900002> diakses 22 Juli 2025

yang berturut-turut ini diklaim sebagai akibat dari penurunan bantuan kebutuhan dasar yang berada di lokasi penampungan, Bangladesh. Dalam kondisi tersebut, pengungsi Rohingya tidak diperbolehkan bekerja ataupun keluar dari kamp, sehingga lebih dari satu juta orang bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan layanan kesehatan.

Dalam dua tahun terakhir, pendanaan dari negara-negara anggota PBB merosot tajam, dari sekitar 70 persen pada 2021 menjadi hanya sekitar 30 persen pada 2023. Akibatnya, jatah makanan dari Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa dipangkas, dari setara 12 dolar AS per orang per bulan menjadi 8 dolar. Kondisi kehidupan yang buruk memicu berbagai persoalan kesehatan. Kedatangan pengungsi Rohingya pada periode tersebut sebagian besar terjadi di salah satu provinsi Indonesia yang paling dekat dengan arah pelarian etnis tersebut yaitu Aceh. Kedatangan pengungsi ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Berbagai masalah terjadi sepanjang tahun 2020-2023 terutama era pandemi covid-19.

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Juni ketika kedatangan gelombang pertama pengungsi Rohingya, Kepolisian Daerah Aceh mengungkapkan adanya dugaan sindikat penyelundupan etnis Rohingya yang membawa rombongan tersebut sampai ke Provinsi Aceh. Oknum penyelundup tersebut ingin dibayar oleh para etnis rohingya sehingga menjadi penyebab rombongan tersebut terapung-apung di lautan

dalam waktu yang lama.⁴ Kasus lainnya beralih pada masalah etnis Rohingya yang berada di lokasi penampungan di Aceh melakukan aksi melarikan diri tanpa sepengetahuan penjaga. Aksi ini dilakukan oleh beberapa pengungsi disebabkan indonesia bukanlah menjadi negara tujuan mereka melainkan hanya menjadi negara transit karena tujuan akhir mereka ingin ke Malaysia.⁵ Namun karena beberapa kasus penolakan dan pemblokiran yang terjadi di negara tersebut, para etnis Rohingya tidak secara sengaja mendarat di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2022, muncul masalah baru yang datang dari masyarakat Aceh dimana mereka secara terang-terangan mulai melakukan penolakan karena beberapa masalah yang berasal dari pengungsi Rohingya sehingga menyebabkan kekesalan masyarakat lokal. Beberapa pengakuan dari masyarakat setempat, mereka mengatakan bahwa, masyarakat mulai terganggu dengan kehadiran etnis tersebut. Contoh masalah kecil yang disebabkan oleh pengungsi Rohingya seperti pencurian buah

⁴ BBC Indonesia, 2020. "Rohingya di Aceh menuturkan pengalaman 'diselundupkan' dari Bangladesh, 'semua tak mau mati, makanya saya berbohong'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54714816#:~:text=Apa%20lagi%20yang%20diungkap?,Sisanya%20belum%20dapat%20dipastikan%20keberadaannya.&text=Usai%20dibawa%20ke%20darat%2C%20pengungsi,virus%20corona%20dan%20hasilnya%20negara%20tif> diakses 22 Agustus 2025

⁵ Liza Tambunan, 2021. "Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh 'kabur', Indonesia menjadi 'titik lemah'", BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047.amp> diakses 22 Agustus 2025

kelapa di kebun milik warga,⁶ sehingga hal ini memicu kemarahan warga lokal yang berada di sekitar lokasi penampungan dan berusaha mendesak pemerintah daerah untuk mengusir atau merelokasi pengungsi tersebut dari wilayah mereka.

Tidak berhenti sampai disitu, ketika gelombang besar kedatangan pengungsi rohingya pada tahun 2023 akhir ke Provinsi Aceh, kapal-kapal yang mendarat dengan beberapa gelombang membawa kurang lebih 1000 orang pengungsi yang mengakibatkan kemarahan bagi seluruh masyarakat Aceh. Pada 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas seperti Universitas Al-Washliyah, Universitas Abulyatama Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Muhammadiyah Aceh melakukan aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan “Protes Anti-Pengungsi” kepada DPR Aceh dan menyampaikan penolakan keras terhadap kehadiran pengungsi Rohingya. Situasi pun semakin memanas ketika para demonstrasi mulai mendekati pengungsi yang sedang melaksanakan sholat hingga menimbulkan keributan. Para mahasiswa juga mendatangi lokasi penampungan dan mulai membuat keributan dengan menendang barang-barang yang ada di lokasi

tersebut serta membakar ban yang menyebabkan banyak pengungsi perempuan dan anak-anak menangis ketakutan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya UNHCR dalam mengatasi berbagai masalah pengungsi rohingya di Provinsi Aceh dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan organisasi lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali bagaimana langkah-langkah yang diterapkan oleh UNHCR dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan aktor-aktor lainnya dalam melindungi hak-hak pengungsi rohingya di Provinsi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas mekanisme kolaborasi yang telah berjalan sejauh ini.

KERANGKA TEORI

Level Analisis Kelompok

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan sebuah level analisis kelompok. Level analisis ini memberikan penjelasan tentang perilaku Negara dan organisasi internasional dalam menanggapi fenomena yang ditentukan oleh beberapa faktor internal.⁸ Level analisis ini akan membantu penulis untuk memfokuskan tindakan UNHCR untuk menanggapi fenomena kedatangan para pengungsi serta bagaimana

⁶ BBC news Indonesia, 2022. “Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh dan ditolak warga, pemerintah Indonesia berencana siapkan lokasi khusus”, [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz5y74eklzlo#:~:text=Rombongan%20pertama%20tiba%20di%20Pesisir,Selasa%20\(27/12\).&text=Dari%20hasil%20pemeriksaan%20petugas%20kesehatan,disiapkan%20oleh%20din%20sosial%20setempat](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz5y74eklzlo#:~:text=Rombongan%20pertama%20tiba%20di%20Pesisir,Selasa%20(27/12).&text=Dari%20hasil%20pemeriksaan%20petugas%20kesehatan,disiapkan%20oleh%20din%20sosial%20setempat). Diakses 22 Agustus 2025

⁷ detikSumut, 2023. “Aksi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya dari Penampungan yang Disesali UNHCR” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7113122/aksi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-dari-penampungan-yang-disesali-unhcr/amp> diakses pada 22 Agustus 2025

⁸ Ibid, hal 899

organisasi tersebut menangani krisis rohingya yang masih menjadi sorotan public karena kedatangan mereka yang terkadang beruntun, mendadak dan memiliki banyak penolakan bagi sebagian warga Aceh.

Perspektif Liberal Institutionalism

Liberal institutionalism yang dikembangkan Robert Keohane dalam tulisannya yang berjudul “*Twenty Years of Institutional Liberalism*” dengan menekankan bahwa kerjasama antarnegara melalui institusi internasional dapat menciptakan stabilitas, mengurangi konflik, serta memperkuat keamanan.⁹ Perspektif meyakini bahwa kerjasama yang dikembangkan oleh negara-negara akan membuka sebuah peluang keamanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun-tahun yang akan datang. Institusi seperti UNHCR dipandang sebagai sarana penting untuk memfasilitasi kolaborasi dan mengatur hubungan antarnegara secara lebih efektif. Pola pikir liberal institutionalism relevan untuk menganalisis peran Organisasi Internasional, termasuk UNHCR dalam isu pengungsi internasional. UNHCR berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara terlibat dalam menangani persoalan pengungsi sesuai dengan mandat dan manajemen organisasi tersebut.

Dari perspektif ini, UNHCR dipengaruhi sekaligus mempengaruhi aktivitas aktor internasional, baik negara maupun non-negara, serta memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan negara lain melalui tindakan yang dilakukan.

Dengan demikian, UNHCR dapat dilihat sebagai lembaga yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam mengatasi persoalan pengungsi, menyalurkan solusi bersama, dan mendukung tercapainya stabilitas internasional. UNHCR tidak hanya berperan sebagai wadah kolaborasi bagi negara terlibat, tetapi juga mampu mempengaruhi negara non-anggota dengan mempromosikan nilai liberalisme dan kemanusiaan sebagai dasar organisasinya.

Teori Organisasi Internasional

Menurut Karen Mingst dalam bukunya yang berjudul *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*, ia mengatakan bahwa salah satu poin dari peran organisasi internasional adalah penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan penanganan bersama dengan memberikan layanan dan bantuan misalnya UNHCR yang menangani masalah pengungsi.¹⁰

Secara umum, teori ini dibangun di atas fondasi pemikiran hubungan internasional, terutama dari pendekatan liberal institutionalism yang melihat organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam sistem global yang memainkan peran krusial dalam menciptakan, mempertahankan, dan menegakkan aturan internasional. Teori organisasi internasional hadir untuk menjelaskan bagaimana organisasi-organisasi ini terbentuk, berfungsi, serta berkontribusi dalam permasalahan sosial yang terjadi. Organisasi internasional dilihat memiliki

⁹ Robert O. Keohane, 2012. “Twenty Years of Institutional Liberalism”, *International Relations*, SAGE Journal, Vol. 25, No 2, Hal 125-138

¹⁰ Karen A. Mingst, 2004. “*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*”, Lynne Rienner Publishers

kapabilitas untuk mempengaruhi agenda global serta membentuk persepsi dan praktik internasional melalui produksi wacana, advokasi, dan penyebaran norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNHCR sebagai Wadah Perlindungan dalam *Emergency Response* Kedatangan Pengungsi Rohingya

Adanya kedatangan mendadak, UNHCR bergerak cepat dalam memberikan perlindungan dengan membangun fasilitas darurat termasuk penampungan sementara, toilet, area cuci tangan, sistem pengelolaan sampah, serta sambungan air minum untuk menangani kondisi darurat. Mereka juga melakukan distribusi barang non-pangan (NFIs) dan menyediakan *shelter* darurat di lokasi penampungan sebelum pengungsi dipindahkan ke fasilitas yang lebih permanen. Lebih lanjut, UNHCR terlibat dalam penyiapan sistem registrasi dan verifikasi status pengungsi. Dengan demikian, proses dokumentasi berjalan lebih lancar, jumlah total 735 pencari suaka berhasil didata di Indonesia sepanjang 2020, dan sebagian besar berasal dari kelompok Rohingya yang datang ke Aceh.

Ketika meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi Rohingya secara signifikan yaitu pada bulan November hingga Desember 2022, lebih dari 470 pengungsi Rohingya mendarat di berbagai wilayah di Aceh, seperti Bireuen, Aceh Utara, dan Pidie. UNHCR kembali mengirimkan tim tanggap darurat ke lokasi pendaratan untuk melakukan pendataan awal, asesmen kebutuhan dasar, serta mendampingi proses penanganan yang dikoordinasikan

bersama Pemerintah Daerah, IOM, dan instansi kemanusiaan lainnya.¹¹ Untuk anak-anak tanpa pendamping dan kelompok rentan lainnya, UNHCR memberikan dukungan perlindungan khusus, termasuk layanan konseling psikososial.¹²

Kondisi kedatangan pada akhir 2022 juga cukup darurat. Salah satu kapal yang membawa lebih dari 180 pengungsi dilaporkan nyaris tenggelam dan terombang-ambing di laut selama berminggu-minggu. UNHCR mengeluarkan seruan publik mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan pendaratan darurat, yang kemudian direspon dengan baik oleh otoritas Aceh. Pada 2023, mengalami peningkatan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh yang ditandai dengan lebih dari 1.500 orang mendarat sepanjang tahun.¹³ Beberapa insiden darurat terjadi ketika kedatangan kapal dalam kondisi rusak berat di wilayah Pidie dan Aceh Timur. UNHCR mengirim tim lapangan dalam waktu 24 jam untuk mendukung asesmen cepat, serta distribusi perlengkapan tanggap darurat seperti terpal, alas tidur, air bersih, dan bahan makanan. Selain bantuan logistik, UNHCR juga mengaktifkan program

¹¹ UNHCR Indonesia, 2022. "UNHCR Respon Cepat Pengungsi di Aceh," UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/berita/unhcr-respon-cepat-aceh-2022> diakses 22 Juni 2025

¹² UNICEF & UNHCR, 2023. "Protecting Children on the Move in Indonesia: Field Response Report"

¹³ BBC Indonesia, 2023. "Pengungsi Rohingya tembus 1.600 orang, mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?" [bbc.com, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo.amp](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo.amp) diakses 22 Juni 2025

Perlindungan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Protection*) di sejumlah lokasi penampungan seperti di Meulaboh dan Lhokseumawe untuk melibatkan para pengungsi dalam sistem pengelolaan mandiri.¹⁴ UNHCR juga memperkuat kerja sama lintas sektor melalui pendekatan *Whole of Society*, yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah lokal, dan organisasi lokal seperti Yayasan *Geutanyoe* dan RUMAN Aceh. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan lebih inklusif dan mencegah diskriminasi terhadap pengungsi.

UNHCR dalam Registrasi dan Penetapan Status Pengungsi

Sebagai organisasi yang menyalurkan mandat kemanusiaan dari PBB, UNHCR bertindak dengan melaksanakan prosedur perlindungan dalam penentuan status pengungsi. Pemberian status ini melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran biometrik dan identifikasi awal untuk memastikan status pengungsi secara individual serta untuk memisahkan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Registrasi dilakukan menggunakan sistem digital yang dikembangkan UNHCR melalui *proGres v4*¹⁵, sebuah platform global yang memungkinkan identifikasi pengungsi dengan data terstandar dan aman.

Registrasi tidak hanya fokus pada data personal, tetapi juga

dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban perdagangan manusia, mengingat banyak di antara pengungsi mengaku ditipu atau dipaksa naik kapal oleh sindikat penyelundup.¹⁶ Oleh karena itu, selain proses administratif, pendekatan perlindungan juga diterapkan, seperti pendampingan psikososial dan pemeriksaan medis sebelum proses verifikasi status. Hasil dari proses registrasi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem UNHCR secara global untuk memastikan pengungsi memiliki akses ke hak dasar, termasuk makanan, air bersih, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan darurat bagi anak-anak. Registrasi ini juga menjadi kunci bagi proses lebih lanjut seperti *reunifikasi* keluarga, pemantauan situasi hukum, hingga kemungkinan penempatan ulang (*resettlement*) di negara ketiga bagi mereka yang memenuhi syarat.¹⁷

¹⁴ UNHCR Indonesia, 2023. "Community-Based Protection Programme in Aceh: Mid-Year Update".

¹⁵ Unhcr Indonesia. "Unhcr's Registration and Case Management System: An Introduction to proGres" <https://wfp-unhcr-hub.org/wp-content/uploads/2021/01/ProGres-UNHCRs-Registration-and-Case-Management-System.pdf> diakses 22 juni 2025

¹⁶ IOM Indonesia, 2020. "Anti-Trafficking Brief: Northern Sumatra Case Report"

¹⁷ UNHCR Indonesia, 2020. "Operational Update: Rohingya Response in Aceh" <https://data.unhcr.org/en/documents>.

Tabel 4.2 Ringkasan Registrasi Status Pengungsi tahun 2020-2023

Tahun	Lokasi Utama Registrasi	Jumlah Pengungsi	Fitur Utama Registrasi	Tantangan Utama
2020	Lhokseumawe, Aceh Utara	Kurang lebih 396 orang dalam 2 gelombang kedatangan	- proGres v4 - Biometrik & wawancara - Identifikasi kelompok rentan - Kolaborasi dengan IOM & Pemda	- Fasilitas terbatas - Risiko COVID-19 - Penipuan sindikat penyelundupan manusia
2021	Lhokseumawe, Bireuen	118 (81 + 37 Orang dalam 2 gelombang kedatangan)	- Data biometrik lebih lanjut - Wawancara perlindungan internasional - Edukasi hak & kewajiban pengungsi	- Hambatan bahasa - Kesehatan pengungsi - Pandemi
2022	Pidie, Aceh Utara	Kurang lebih 467 orang dalam 4 gelombang kedatangan	- Registrasi cepat (24-48 jam) - Pendataan identitas & asal perjalanan - Asesmen kebutuhan darurat	- Situasi kedatangan darurat - Kesiapan SDM lokal
2023	Seluruh wilayah penerimaan	Kurang lebih 1.432 orang dalam 4 gelombang kedatangan	- Verifikasi biometrik lanjutan - Penguatan kapasitas lokal - Pencegahan duplikasi data - Basis komunikasi	- Data sensitif - Koordinasi multi-level

Sumber: unhcr.org, 2020-2023

UNHCR dalam Penanganan Masalah Lokasi Penampungan

UNHCR merupakan aktor utama yang menjalankan berbagai keputusan terkait penempatan

pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. UNHCR Indonesia sejak tahun 2022 mengusulkan agar penampungan pengungsi Rohingya di Aceh diorganisasikan secara

terpusat di satu lokasi strategis seperti Aceh Tamiang atau Gayo Lues untuk mempermudah koordinasi operasional dan penanganan kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah dan mitra kemanusiaan.

UNHCR menekankan pentingnya sistem sentralisasi agar distribusi bantuan, pengawasan keamanan, registrasi, dan layanan psikososial menjadi lebih terstruktur. Tanpa lokasi terpusat, pengungsi rentan kabur dan fragmentasi penanganan pun meningkat. Salah satu tujuan sentralisasi adalah mencegah pengungsi menyebar ke lokasi-lokasi yang tidak layak. Data polisi mencatat sepanjang 2023 sebanyak 190 pengungsi lolos dari area penampungan di Banda Aceh, meningkatkan risiko penyelundupan atau korban dari perjalanan ilegal. UNHCR mendukung rencana pemerintah daerah Aceh untuk membentuk Satgas bersama yang mengkaji penempatan lokasi pengungsi. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM dan pemerintah daerah, UNHCR menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan satgas dan wacana lokasi tunggal penampungan.¹⁸

UNHCR menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah sesuai Perpres No. 125 Tahun 2016.¹⁹ UNHCR menyampaikan bahwa kondisi beberapa lokasi saat ini sangat tidak layak bagi pengungsi tidur di bibir

pantai atau ruang bawah tanah gedung sementara yang sulit dijangkau dan melemahkan efektivitas distribusi bantuan. Sejak 2022, UNHCR telah mendorong strategi sentralisasi guna meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, pengawasan, dan layanan dasar lainnya. Namun upaya ini menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan lahan yang layak, resistensi masyarakat lokal, dan kapasitas lokasi darurat yang sudah melebihi batas. Kondisi ini berdampak langsung pada keamanan pengungsi dan efisiensi penanganan oleh otoritas serta mitra kemanusiaan.

UNHCR dalam Penanganan Era Pandemi COVID-19

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh selama masa pandemi COVID-19 meliputi langkah-langkah pencegahan penularan, seperti pelaksanaan tes swab dan vaksinasi, serta penyediaan bantuan kemanusiaan dan tempat penampungan sementara oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan UNHCR²⁰. Pada September 2020, 81 pengungsi Rohingya yang terdampar telah menjalani tes swab antigen di Pulau Idaman, Kuala Simpang Ulim, dengan hasil seluruhnya non reaktif COVID-19 untuk sementara waktu. Meski

¹⁸ Komnas HAM Perwakilan Aceh, 2023. "UNHCR Apresiasi Komnas HAM Perwakilan Aceh Dalam Tangani Pengungsi Rohingya di Aceh,"

¹⁹ Ringkasan Interview dengan Senior Communications Assistant UNHCR, Muhammad Yanuar Farhanditya, Parboaboa (27 Desember 2023)

²⁰ Media Aceh Timur, 2021. "Pemkab Aceh Timur Dirikan Dua tenda dan Salurkan bantuan Masa Panik untuk Pengungsi Rohingya", <https://acehtimurkab.go.id/berita/kategori/berita-pemerintahan/pemkab-aceh-timur-dirikan-dua-tenda-dan-salurkan-bantuan-masa-panik-untuk-pengungsi-rohingya#:~:text=Selain%20itu%2C%20tadi%20pagi%20juga,agar%20terhindar%20dari%20wabah%20Corona> diakses 24 Agustus 2025

demikian, masyarakat tetap diimbau menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus Corona.

Penanganan para pengungsi di lokasi tersebut juga melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, sejumlah dinas sosial setempat, serta dukungan dari masyarakat sekitar. Penanganan Covid-19 terbatas pada penerapan protokol kesehatan di area penampungan, dengan penempatan petugas secara bergilir untuk mendukung tim dalam penanganan. Sementara itu, UNHCR berupaya memperoleh akses vaksin Covid-19 dan mendorong Pemerintah Indonesia agar memasukkan pengungsi dan pencari suaka dalam program vaksinasi nasional.

Penanganan Bersama Lembaga Internasional, Pemda dan LSM

Dalam menangani isu pengungsi Rohingya di Aceh selama periode 2020–2023, UNHCR memperkuat koordinasi dengan berbagai aktor, baik internasional, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dilakukan karena pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh, tidak memiliki status hukum yang jelas, sementara Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951. Meski demikian, melalui Perpres 125/2016, UNHCR mendapat ruang legal untuk melaksanakan mandat perlindungan pengungsi.

1 Lembaga Internasional

a IOM (*International Organization for Migration*)

UNHCR dan IOM menjadi mitra utama dalam mengelola lokasi pendaratan dan penampungan pengungsi di Aceh. Keduanya berbagi peran, di mana IOM lebih menitikberatkan pada logistik dan

layanan medis, sementara UNHCR fokus pada perlindungan hukum internasional, khususnya bagi kelompok rentan. Kolaborasi ini juga diwujudkan dalam forum *Refugee Working Group* di tingkat daerah. Pendanaan IOM banyak berasal dari *Swiss Agency for Development and Cooperation* (SDC) dan ECHO. Selain itu, IOM turut menginisiasi program pemberdayaan ekonomi lokal demi menjaga kohesi sosial dengan masyarakat Aceh.

b CERF (*Central Emergency Response Fund*)

CERF menyalurkan sejumlah dana yang kemudian dimanfaatkan UNHCR untuk penanganan darurat, seperti pengadaan tenda, MCK, layanan kesehatan, makanan siap saji, serta air bersih, khususnya ketika terjadi lonjakan kedatangan pengungsi pada 2020 dan 2022. Dukungan ini memungkinkan UNHCR menjangkau daerah pendaratan terpencil seperti Muara Batu dan Seunuddon.

c MPTF (*Multi Partner Trust Fund*)

Pada 2023, UNHCR bersama IOM, UNICEF, WHO, dan WFP memperoleh dukungan dari MPTF dan *South East Asia Emergency Fund* dengan total permintaan global mencapai USD 290 juta. Sebagian dana dialokasikan untuk operasi di Aceh, meliputi pembangunan shelter yang lebih layak serta penyediaan layanan psikososial.

2 Pemerintah Daerah

Sejak terjadinya kedatangan pengungsi Rohingya dari tahun 2020 hingga 2023, UNHCR telah menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Daerah Aceh dalam upaya penanganan masalah-masalah pengungsi Rohingya yang berada di

wilayah tersebut. UNHCR berperan sebagai fasilitator dengan menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani masalah Rohingya di Provinsi Aceh. Koordinasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek logistik, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

Pada tahun 2020, UNHCR bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) dan Dinas Sosial Aceh dalam menyediakan kebutuhan mendesak para pengungsi di lokasi pendaratan sementara di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa UNHCR berkewajiban sebagai wadah mediator kebijakan kemanusiaan dalam kondisi darurat untuk menentukan langkah strategis penanganan di lapangan. UNHCR menyediakan tenda darurat, peralatan kebersihan, serta mendukung pembentukan sistem koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan instansi kesehatan dan kepolisian. UNHCR juga mendukung Pemerintah Aceh dalam proses identifikasi dan pendataan awal pengungsi yang mendarat secara massal pada pertengahan tahun tersebut.²¹

Setelah penanganan tersebut mendapatkan respon yang baik, bentuk kolaborasi berkembang ke arah penyediaan *shelter* semi permanen di Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe, yang difungsikan sebagai tempat penampungan terpusat. UNHCR juga berperan dalam meningkatkan

kapasitas tenaga kerja lokal dan aparat pemerintah melalui pelatihan tentang perlindungan pengungsi dan standar internasional. Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan juga difasilitasi dalam rangka menjamin akses pengungsi terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan informal.²²

3 Lembaga Masyarakat

UNHCR bekerja sama dengan Yayasan *Geutanyoe* sebagai mitra utama untuk kegiatan community engagement, pendidikan, dan advokasi. Lembaga ini berperan dalam menjembatani komunikasi antara pengungsi dengan masyarakat lokal dan otoritas setempat, serta mendukung penguatan kapasitas lokal dalam penanganan pengungsi. Yayasan *Geutanyoe* juga memfasilitasi kegiatan pemulihan trauma dan pelatihan keterampilan dasar bagi pengungsi. Ketika terjadi aksi demonstrasi terkait “Anti Pengungsi Rohingya” yang dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa universitas, hal ini sangat disayangkan oleh beberapa pihak tentunya, termasuk UNHCR. UNHCR mengecam kejadian tersebut dan mendesak pemda dan LSM untuk mengambil tindakan penyelamatan dari lokasi penampungan yang mengalami kerusuhan.

Melalui koordinasi dengan UNHCR, organisasi juga berkolaborasi dengan JRS dalam memberikan layanan *psychosocial support*, khususnya bagi perempuan dan anak-anak pengungsi Rohingya yang mengalami trauma perjalanan laut, atau bahkan kekerasan yang

²¹ UNHCR Indonesia, 2020. “*Update on Rohingya Refugees in Aceh*”, <https://www.unhcr.org/id/en/20416-update-rohingya-aceh-2020.html>

²² IOM Indonesia, *Rohingya Response in Aceh: 2021 Report*, 2021, <https://indonesia.iom.int/rohingya-aceh-2021>

mereka alami. Di sejumlah tempat penampungan, JRS juga turut memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, seperti akses terhadap air bersih, makanan, pendidikan informal, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Evaluasi dan Tantangan Lanjutan

Pada periode 2020 hingga 2023, UNHCR memainkan peran kunci dalam penanganan krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Evaluasi terhadap upaya tersebut menunjukkan adanya pencapaian penting, meskipun masih ditemui sejumlah keterbatasan dalam praktik lapangan. Dari sisi keberhasilan, UNHCR mampu menjalankan mandat utamanya sebagai lembaga perlindungan hak-hak pengungsi, disertai penyediaan bantuan darurat yang cepat dan relatif tepat sasaran. Setiap gelombang kedatangan direspon melalui distribusi tenda, pangan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Selain itu, UNHCR memimpin proses registrasi dan identifikasi awal pengungsi, yang menjadi landasan bagi perlindungan hukum maupun alokasi logistik. Program pelatihan aparat lokal mengenai prinsip perlindungan pengungsi, serta advokasi khusus bagi perempuan dan anak, juga mencerminkan peningkatan koordinasi di tingkat daerah.

Dalam menghadapi kasus dugaan penyelundupan manusia yang turut memperbesar arus kedatangan ke Aceh, UNHCR bekerja sama dengan aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI, hingga berhasil menangkap serta menangkap sejumlah pelaku. Kendati demikian, respons ini juga menghadapi tantangan struktural. Salah satu kritik

utama adalah lambannya penyediaan fasilitas penampungan permanen yang memadai. Meskipun telah diupayakan pembangunan shelter sementara bersama mitra lokal, sebagian besar pengungsi masih harus bertahan dalam kondisi yang kurang layak untuk waktu yang panjang. Hambatan lain muncul dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama di kabupaten yang minim pengalaman menangani pengungsi, akibat keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia.

Tantangan berkelanjutan lainnya meliputi keterbatasan dana operasional, ketergantungan pada bantuan internasional, serta kesulitan dalam pelaksanaan repatriasi sukarela atau penempatan ke negara ketiga (*resettlement*). UNHCR juga dihadapkan pada masalah pengungsi yang tidak memiliki dokumen, yang memperlambat proses legalisasi status dan menghambat akses mereka terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap respons UNHCR selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun organisasi ini memiliki komitmen tinggi dan kapasitas operasional yang kuat, keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, koordinasi lintas sektor, dan kesinambungan pendanaan. Oleh karena itu, pendekatan jangka panjang berbasis komunitas perlu semakin diperkuat agar perlindungan pengungsi di Indonesia, khususnya di Aceh, dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh pada

periode 2020–2023 menegaskan peran signifikan UNHCR sebagai aktor utama dalam memberikan perlindungan, layanan kemanusiaan, serta mediasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai langkah yang dilakukan UNHCR meliputi respons darurat berupa penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, dan bantuan dasar; proses registrasi serta penetapan status pengungsi melalui sistem digital *proGres v4*; hingga pemberian dukungan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan korban kekerasan.

Koordinasi multilateral yang dijalin UNHCR dengan IOM, CERF, MPTF, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat lokal terbukti memperkuat efektivitas penanganan, baik dalam aspek logistik, perlindungan hukum, maupun pemulihan sosial. Meski demikian, berbagai kendala masih ditemui, antara lain keterbatasan kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, minimnya sumber daya manusia dan finansial, serta resistensi sebagian masyarakat lokal terhadap keberadaan pengungsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh telah berjalan efektif dalam kerangka perlindungan kemanusiaan dan kerja sama multistakeholder. Namun, keberlanjutan dan optimalisasi penanganan krisis ini memerlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah Indonesia melalui penguatan kebijakan nasional, dukungan masyarakat lokal, serta kesinambungan bantuan internasional. Hanya dengan sinergi yang lebih komprehensif,

perlindungan hak dan kesejahteraan pengungsi Rohingya dapat terjamin secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia, 2020. “*Rohingya di Aceh menuturkan pengalaman ‘diselundupkan’ dari Bangladesh, ‘semua tak mau mati, makanya saya berbohong’*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54714816#:~:text=Apa%20lagi%20yang%20diungkap%20dipastikan%20keberadaannya.&text=Usai%20dibawa%20ke%20darat%2C%20pengungsi,virus%20corona%20dan%20hasilnya%20negatif>
- BBC news Indonesia, 2022. “*Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh dan ditolak warga, pemerintah Indonesia berencana siapkan lokasi khusus*”, [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz5y74eklzlo#:~:text=Rombongan%20pertama%20tiba%20di%20Pesisir,Selasa%20\(27/12\).&text=Dari%20hasil%20pemeriksaan%20petugas%20kesehatan,disiapkan%20oleh%20dinas%20sosial%20setempat](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz5y74eklzlo#:~:text=Rombongan%20pertama%20tiba%20di%20Pesisir,Selasa%20(27/12).&text=Dari%20hasil%20pemeriksaan%20petugas%20kesehatan,disiapkan%20oleh%20dinas%20sosial%20setempat)
- BBC Indonesia, 2023. “*Pengungsi Rohingya tembus 1.600 orang, mengapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?*” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nye1ewp2xo.amp>
- Concern Worldwide US, 2025. “*The Rohingya Crisis, explained*” <https://concernusa.org/news/rohingya-crisis-explained/>
- detikSumut, 2023. “*Aksi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya dari*

- Penampungan yang Disesali UNHCR*
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7113122/aksi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-dari-penampungan-yang-disesali-unhcr/amp>
- Dw.com, 2022. “Kronologi 5 tahun Krisis Rohingya”
<https://amp.dw.com/id/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya/a-62900002>
- Farhanditya, Muhammad Yanuar, 2020. *Ratusan Pengungsi Rohingya membutuhkan Bantuan Darurat anda*, UNHCR,
<https://www.unhcr.org/id/13173-ratusan-pengungsi-rohingya-membutuhkan-bantuan-darurat-anda.html>
- IOM Indonesia, 2020. “Anti-Trafficking Brief: Northern Sumatra Case Report”
- IOM Indonesia, *Rohingya Response in Aceh: 2021 Report*, 2021,
<https://indonesia.iom.int/rohingya-aceh-2021>
- Keohane, Robert O. 2012. “Twenty Years of Institutional Liberalism”, *International Relations*, SAGE Journal, Vol. 25, No 2, Hal 125-138
- Komnas HAM Perwakilan Aceh, 2023. “UNHCR Apresiasi Komnas HAM Perwakilan Aceh Dalam Tangani Pengungsi Rohingya di Aceh,”
- Media Aceh Timur, 2021. “Pemkab Aceh Timur Dirikan Dua tenda dan Salurkan bantuan Masa Panik untuk Pengungsi Rohingya”,
<https://acehtimurkab.go.id/berita/kategori/berita-pemerintahan/pemkab-aceh-timur-dirikan-dua-tenda-dan-salurkan-bantuan-masa-panik-untuk-pengungsi-rohingya#:~:text=Selain%20itu%2C%20tadi%20pagi%20juga,agar%20terhindar%20dari%20wabah%20Corona>
- Mingst, Karen A. 2004. “*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*”, Lynne Rienner Publishers
- Tambunan, Liza, 2021. “Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh ‘kabur’, Indonesia menjadi ‘titik lemah’”, BBC News Indonesia,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047.amp>
 diakses 22 Agustus 2025
- Unhcr Indonesia. “*Unhcr’s Registration and Case Management System: An Introduction to proGres*”
<https://wfp-unhcr-hub.org/wp-content/uploads/2021/01/ProGres-UNHCRs-Registration-and-Case-Management-System.pdf>
 diakses 22 juni 2025
- UNHCR Indonesia, 2020. “*Operational Update: Rohingya Response in Aceh*”
<https://data.unhcr.org/en/documents>
- UNHCR Indonesia, 2020. “*Update on Rohingya Refugees in Aceh*”,
<https://www.unhcr.org/id/en/20416-update-rohingya-aceh-2020.html>
- UNHCR Indonesia, 2022. “*UNHCR Respon Cepat Pengungsi di Aceh*,” UNHCR Indonesia,
<https://www.unhcr.org/id/berita/unhcr-respon-cepat-aceh-2022>
 diakses 22 Juni 2025
- UNICEF & UNHCR, 2023. “*Protecting Children on the Move in Indonesia: Field Response Report*”

UNHCR Indonesia, 2023.
“Community-Based Protection

*Programme in Aceh: Mid-Year
Update”*